

BAB III

PERUBAHAN ORIENTASI PERHIMPUNAN INDONESIA DARI ORGANISASI MAHASISWA MENJADI ORGANISASI POLITIK

3.1 Perubahan Orientasi Gerakan Perhimpunan Indonesia

Indische Vereeniging dalam perkembangannya terbagi menjadi beberapa fase yaitu tahun 1908-1912 adalah masa Moderat adalah fase yang hanya fokus pada pengembangan sosial dan budaya.⁶⁸ Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa Indonesia di Belanda, dengan pendekatan yang lebih kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Mereka masih berpegang pada pola moderat dalam perjuangan. Tahun 1912- 1918 adalah masa kooperatif adalah fase Perhimpunan mulai memperluas visi politiknya.⁶⁹ Meskipun masih ada elemen kerjasama dengan pemerintah, mereka mulai menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh radikal, termasuk anggota Indische Partij, dan mulai mempermasalahkan hak-hak politik dan identitas bangsa. Ini adalah periode transisi menuju pendekatan yang lebih berani. dan tahun 1918-1930 fase masa Radikal adalah fase Perhimpunan Indonesia bertransformasi menjadi organisasi yang lebih nasionalis dan radikal.⁷⁰ Mereka mengadvokasi kemerdekaan dan penentangan terhadap kolonialisme, menuntut perubahan struktural dalam pemerintahan kolonial dan memperjuangkan hak-hak politik bagi semua rakyat Indonesia.

⁶⁸ Utomo, *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan*, Semarang : IKIP Semarang Press, 1995:84.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

3.2 Indishe Vereeniging dengan Boedi Oetomo

Indishe Vereeniging memiliki kesamaan dengan berdirinya perkumpulan yang lahir di Indonesia, yaitu perkumpulan Boedi Oetomo. Boedi Oetomo didirikan pada tahun 1908 di dalam ruang sekolah di Stovia di Weltevreden, Jakarta⁷¹. Boedi Oetomo dan Indishe Vereeniging pada asalnya adalah organisasi organisasi mahasiswa. Namun perkembangan Boedi Oetomo dan Indishe Vereeniging selanjutnya tidak berjalan sejajar. Boedi Oetomo tetap setia pada pola aslinya, yakni suatu perkumpulan orang-orang intelek asal pulau Jawa, sedangkan Indishe Vereeniging akan berkembang menjadi Organisasi Perhimpunan Indonesia yang kemudian dalam waktu lama akan berkembang dari perkumpulan sosial menjadi perkumpulan yang nasionalis-radikal dengan kecenderungan politik di dalamnya.

Indische Vereeniging yang pada mulanya hanya bercorak sederhana dan bersifat sosialkultural. Namun lahirnya Indishe Vereeniging memiliki arah dalam dua hal, Pertama, Indishe Vereeniging membuka pintu keanggotaan untuk semua mahasiswa dari Hindia Belanda, tidak seperti Boedi Utomo yang sekalipun didirikan pada tahun yang sama, waktu lama menjadi Organisasi yang beranggotakan orang Jawa saja. Pilihan kearah itu Indishe Vereeniging tidaklah suatu yang kebetulan, karena pada mulanya di antara para pendirinya mengusulkan untuk membuat perkumpulan itu menjadi cabang Boedi Oetomo di negeri Belanda⁷². Akan tetapi walaupun mayoritas mahasiswa Hindia Belanda di Belanda itu adalah orang Jawa, usul itu tidak diterima oleh mereka yang berasal dari

⁷¹ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1994, hlm 29.

⁷² Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 67.

Sumatera, Minahasa, Maluku, dan lain lainnya. Akibatnya Indishe Vereening tidak di bentuk sebagai cabang Boedi Oeromo di Belanda, tapi sebagai Organisasi Perhimpunan Mahasiswa yang berdiri sendiri di negeri Belanda. Kedua, Indishe Vereeniging bukan hanya sekedar organisasi persahabatan seperti di tulis oleh beberapa sejarawan. Hal itu terbukti dari pasal 2 dari Anggaran Dasarnya yang menetapkan sebagai berikut: “memperbaiki atau meningkatkan kepentingan Bersama orang Hindia di negeri Belanda dan memelihara hubungan dengan Hindia Belanda”.⁷³

Berdirinya Indishe Vereeniging sesungguhnya lebih di sebabkan oleh terasanya kebutuhan orang orang Indonesia di perantauan untuk berkumpul dari pada karena kesadaran akan panggilan untuk mengemban tugas bersejarah. Itulah sebabnya mengapa tujuan utamanya adalah seperti yang tercantum pada pasal 2 Anggaran Dasarnya, “Memajukan kepentingan Bersama dari pada orang orang Hindia di Belanda, dengan memelihara hubungan dengan Hindia Belanda”. Namun walaupun pada umumnya Indishe Vereeniging merupakan suatu perkumpulan untuk kerukunan dalam dirinya ada semacam benih partriotisme. Tak lama kemudian pasal Anggaran Dasar di ubah, dimana disebutkan bahwa selain mengusahakan kerukunan yang lebih erat, juga harus menumbuhkan rasa solidaritas kesetiakawanan diantara orang orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda.

Dalam delapan tahun setelah Indishe Vereeniging didirikan, banyak terjadi pergantian kepengurusan di dalamnya, Indishe Vereeniging sudah di jabat oleh

⁷³ Akira Nagazumi. *Masa Awal Pembentukan “Perhimpunan Indonesia”: Kegiatan Mahasiswa Indonesia Di Negeri Belanda, 1916-1917*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1986, hlm 135.

delapan orang ketua yang berbeda setiap tahunnya, ketua Indishe Vereening pada delapan tahun setelah dirikan nya adalah Soetan Casayangan (1908-1909), Soetan Casayangan (1909-1910), Ph. Laoh Peridode (1910), Hoesen Djajadiningrat (1910), Noto Soeroto (1911-1913), Noto Soeroto (1913-1914), Ratu Lagie (1914-1915), Loekman Dajajaningrat (1915-1916).

Sekalipun telah mengalami pergantian ketua dalam kepengurusan organisasi, namun Indsihe Vereeniging tetap setia dengan membawa narasi organisasi mahasiswa nya yang hanya berfokus pada kesejahteraan pendidikan nya orang orang Hindia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda dan banyak mempertahankan sikap koperatif nya terhadap Pemerintah Belanda. Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan Noto Soeroto,⁷⁴ yang merupakan putra dari pangeran Notodirodjo, seorang pangeran dari keluarga Sri Paku Alam dari Yogyakarta, ketika pada tahun 1913 pemerintah Belanda merayakan peristiwa 100 tahun kemerdekaannya dari kekuasaan Napoleon Bornaparte,⁷⁵ tokoh tokoh Indishe Vereeniging justru mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan ikut serta dalam parade itu. Reaksi Indishe Vereeniging sangat berlawanan dengan sikap Indishe Partij yang radikal. Tokoh Indishe Partij bahkan samapai menentang mobilitasi dana dari penduduk bumi Putera untuk keperluan merayakan peristiwa itu.

3.3 Interaksi Indishe Vereening dengan Indishe Partij

Indishe Vereniging tahun 1913 kedatangan angin segar dari Indishe partij yang membawa gagasan Revolusioner di dalam nya, pada waktu itu para tokoh

⁷⁴ Sudiyo, *Perhimpunan Indonesia*, Jakarta: Bina Adiaksara 2004, hlm 24.

⁷⁵ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 68.

Indishe Partij datang ke negeri Belanda akibat menerima hukuman buangan dari Pemerintah Hindia Belanda karena sikap mereka yang dianggap radikal dan mengganggu keamanan.⁷⁶ Para tokoh Indishe Partij itu adalah R.M Suwardi Surjaningrat, Tjipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker.

Indishe Partij memiliki ciri khas sebagai organisasi non kooperatif terhadap pemerintah kolonial, hal itu terjadi karena tujuan dari organisasi Indishe Partij adalah untuk membangun patriotisme bangsa Hindia kepada tanah air yang telah memberikan lapangan hidup, dan menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan guna memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.⁷⁷ Indishe Partij menganggap cita cita lepas dari negeri jajahan Belanda adalah tujuan akhir gerakannya.⁷⁸ Sehingga selama Indishe Partij berdiri, Indische Partij terus berfokus pada perjuangan untuk hak-hak politik dan kemerdekaan bagi penduduk pribumi, serta menuntut reformasi yang signifikan dalam struktur pemerintahan kolonial. Dalam mencapai tujuannya Indishe Partij selalu membawa dengan cara radikal nya yang bersikap keras dalam memperjuangkan cita cita kemerdekaannya, keadaan seperti itulah yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda juga bersikap keras terhadap Indishe Partij.

Akibat dari tindakan tersebut pada tanggal 4 maret 1913 Indishe Partij di nyatakan sebagai organisasi telarang. Dan kemudian Gubernur Jendral Hindia Belanda menggunakan *Exorbitante Rechten*⁷⁹ untuk memberikan hukuman

⁷⁶ Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908-1945. Yogyakarta:Pustaka Pelajar 1994,hlm 35.

⁷⁷ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta:KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 60.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹Exorbitante Rechten adalah Hak Istimewa Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk melakukan penangkapan,pembuangan,pemberangusan pers, bisa di lihat pada Poeze, *Di Negeri*

buangan kepada Dowes Dakker, Soewardi dan Tjipto Mangunkusumo ke negeri Belanda.

Walaupun merima hukuman buangan dari pemerintah Hindia Belanda , para buangan itu justru tidak merasa terugikan, karena saat di Belanda justru mereka di terima sebagai tamu kehormatan oleh partai Sosial Democratische Arbeiders Partij (SDAP),⁸⁰ hal itu di sebabkan karena Dowes Dekker banyak menjalin hubungan baik dengan SDAP, bahkan saat dilaksanakannya pertemuan umum di Parlemen SDAP cenderung membela para buangan dan terang terangan menentang di terapkannya Exorbitante Rechten dalam majalah berita nya.

Di asingkan ke negeri Belanda tidak membuat padam nya pergerakan yang di lakukan Dowes Dekker, Soewardi dan Tjipto Manungkusumo. Mereka justru masih memiliki tempat dan kesempatan untuk menyebarkan gagasan pergerakannya di negeri Belanda, bersama dengan tokoh tokoh lainnya yang seasas sama, mereka membentuk Indiers Comite (Komite Orang Hindia) yang kemudian menerbitkan majalah *De Indier*, *Weekblad Gewijd aan het geestelijk en maatschappelijk leven van Indie en Oost Azie* (Orang Hindia, Mingguan untuk kehidupan Batiniah dan Kemasyarakatan Hindia dan Asia Timur) , majalah ini tebit pada 23 Oktober 1913 dan berakhir pada 14 Desember 1914.⁸¹ Walaupun memiliki masa yang relatif singkat, namun muatan isi dalam majalah De Indier yang berisi tentang informasi tentang Hindia dan cita cita Indishe Partij yang revolusioner mampu di sebarluaskan di negeri Belanda.

Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 89.

⁸⁰ Sudiyo, *Perhimpunan Indonesia*, Jakarta: Bina Adiaksara 2004, hlm 24.

⁸¹ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm. 72.

Di Belanda Douwes Dekker, Soewarji dan Tjipto Mangoenkoesoemo memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota Indishe Vereening. Interaksi ini membuahkan adanya menanamkan gagasan Indishe Partij kepada anggota Indishe Vereening sehingga memperkuat semangat nasionalisme dan memfasilitasi pengembangan strategi perjuangan yang lebih efektif.

Penanaman gagasan Indishe Partij tidak langsung di terima dengan mudah oleh Indishe Vereening, terutama oleh ketua Indishe Vereening pada saat itu di jabat oleh Noto Soeroto pada tahun 1913.⁸² Noto Soeroto beranggapan bahwa cara kerja dan metode dari Indishe Partij sama sekali tidak sejalan dengan gambaran Indishe Vereening. Hal ini di dasari karena pergerakan Indishe Partij dan Indishe Vereening memiliki khas yang berbeda , Indsihe Partij adalah Partai anti Nederland sedangkan Indishe Vereening adalah perhimpunan yang loyal dengan Pemerintah Belanda.⁸³ Sempat terjadi konfrontasi langsung antara Noto Soeroto dengan para buangan terutama dengan Dowes Dekker dalam pertemuan yang di adakan sebagai perayaan hari ulang tahun Indishe Vereening yang ke lima yaitu pada bulan November 1913.

Dalam pidatonya yang berjudul *De Eendracht van Indie en Nederland* yang diterjemahkan sebagai "Kesatupaduan Hindia dan Negeri Belanda," Noto Soeroto menyampaikan pandangannya tentang pentingnya hubungan harmonis antara Hindia dan Belanda.⁸⁴ Pidato ini menekankan bahwa untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, Hindia harus membangun kesatupaduan dengan Belanda, dengan harapan bahwa kolaborasi ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

⁸² *Ibid*, hlm 79.

⁸³ *Ibid*, hlm 89.

⁸⁴ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 90.

Ia berargumen bahwa kerjasama ini diperlukan untuk memajukan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Hindia.

Pidato Noto Soeroto yang pro terhadap pemerintah Belanda tidak luput dari kritik. Douwes Dekker, seorang tokoh penting dalam pergerakan nasional, memberikan tanggapan yang tajam terhadap argumen Noto Soeroto. Ia menyatakan, "Noto Soeroto berkali-kali lebih Belanda daripada orang Belanda itu sendiri dan bukan orang Jawa."⁸⁵ Pernyataan ini menggambarkan kekecewaannya terhadap pandangan Soeroto yang dinilai terlalu bersifat kolonial dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia.

Douwes Dekker menekankan dalam pidatonya bahwa justru pendekatan yang diambil oleh Noto Soeroto akan memperkuat politik kolonial yang ada dan tidak memberikan ruang bagi pergerakan menuju kemerdekaan. Ia berpendapat bahwa hubungan antara Hindia dan Belanda seharusnya tidak didasarkan pada kesetiaan sepihak, tetapi harus memperhatikan hak dan kepentingan rakyat Hindia yang ingin meraih kebebasan dari penjajahan.⁸⁶ Dengan kata lain, Douwes Dekker menyerukan perlunya kesadaran kolektif dikalangan rakyat Hindia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengatasi ketidakadilan yang dialami.

Polemik antara Noto Soeroto dan Douwes Dekker ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat dikalangan intelektual dan aktivis politik pada masa itu. Diskusi tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang mendalam dalam cara pandang terhadap hubungan antara Hindia dan Belanda, serta mencerminkan perubahan sosial dan politik yang mulai mengemuka dikalangan masyarakat

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ John Ingleson, *Mahasiswa Nasionalisme & Penjara, Perhimpunan Indonesia 1923-1928*, Depok: Komunitas Bambu, 2018, hlm 19.

Indonesia. Kontroversi ini menjadi bagian penting dari dinamika pergerakan nasional yang berujung pada perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij ke Belanda membawa pengaruh signifikan terhadap perkembangan Indische Vereeniging. Gagasan-gagasan radikal yang diperkenalkan oleh Douwes Dekker, Soewardi, dan Tjipto Mangunkusumo merupakan awal pemicu perubahan ideologis di kalangan anggota Indische Vereeniging, mendorong mereka untuk berpikir lebih jauh mengenai hak politik dan kemerdekaan bagi rakyat Hindia.

Indische Vereeniging pada periode ini tetap berpegang pada pola kooperatifnya, namun pengaruh dari Indische Partij membantu peningkatan kesadaran politik di kalangan mahasiswa Hindia di Belanda, yang kedepannya memicu terbentuknya kelompok diskusi yang akan membahas isu-isu politik lebih luas. Dampak dari Interaksi Indische Partij menimbulkan ketegangan ideologis, mengingat perbedaan visi antara Noto Soeroto ketua Indische Vereeniging, dan para tokoh Indische Partij yang lebih radikal.⁸⁷ Ketegangan ini menciptakan konfrontasi yang akhirnya berujung pada perpecahan di antara para anggota Indische Vereeniging. Dengan adanya pengaruh Indische Partij, Indische Vereeniging mulai mengembangkan identitas nasional yang lebih kuat, di mana ide-ide tentang kebanggaan akan tanah air dan perjuangan untuk kemerdekaan mulai meresap dalam aktivitas dan diskusi mereka. Secara keseluruhan, kedatangan Indische Partij telah mendorong evolusi Indische Vereeniging dari organisasi yang awalnya bersifat sosial-kultural menjadi lebih terlibat dalam dinamika politik dan perjuangan kemerdekaan di Hindia. Hal

⁸⁷ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 93.

serupa juga disebutkan oleh pengalaman tokoh tokoh itu tidak hanya secara langsung menambah informasi tentang keadaan perjuangan, tetapi pengaruh yang memancar dari tokohh tokoh dengan kepribadian serta kepemimpinan yang menonjol memberi inspirasi yang lebih besar kepada para mahasiswa.⁸⁸

3.4 Interaksi Indishe Vereeniging dengan Perserikatan Pelajar Indonesia

Perserikatan Pelajar Indonesia yang dikenal dengan nama Het Indonesisch Verbond van Studeerenden (HIVS), merupakan organisasi yang dibentuk oleh pelajar-pelajar Belanda, Indonesia serta pelajar dari Indo-China, dengan tujuan utama untuk bekerja sama dalam upaya pembangunan di wilayah Hindia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1918 di tengah dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung di Indonesia dan dunia.⁸⁹ J.A. Jonkman diangkat sebagai ketua pertama HIVS,⁹⁰ yang menjadi simbol dari kolaborasi antar generasi muda yang memiliki latar belakang budaya dan pendidikan yang beragam.

Keputusan Indische Vereening untuk bergabung dengan HIVS dipandang sebagai langkah strategis yang diharapkan akan membawa keuntungan dalam pengembangan organisasi. Melalui integrasi ini, Indische Vereening memperoleh akses yang lebih luas terhadap jaringan relasi di Belanda, yang berkontribusi pada peningkatan visibilitas organisasi dikalangan masyarakat Belanda. Peningkatan relasi ini tidak hanya meningkatkan reputasi Indische Vereening sebagai perkumpulan, tetapi juga memudahkan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Belanda dalam mencari dukungan akademis dan sosial.

⁸⁸ Kartodirdjo, *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm 150.

⁸⁹ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta:KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 215.

⁹⁰ *Ibid.*

Sebelum bergabung dengan HIVS, majalah Hindia Poetra, yang diterbitkan oleh Indische Vereening, mengalami kesulitan yang signifikan, termasuk kebangkrutan akibat kekurangan dana untuk menerbitkan edisi-edisi baru. Namun, setelah bergabung dengan HIVS, majalah tersebut mampu bangkit kembali berkat penggabungan sumber daya dan dukungan yang lebih kuat dari anggota HIVS. Dengan demikian, majalah ini tidak hanya melanjutkan penerbitannya, tetapi juga menjadi platform yang penting untuk menyuarakan aspirasi dan pemikiran intelektual pelajar Indonesia pada masa itu.

HIVS dan Indische Vereening memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan ruang dialog bagi generasi muda Indonesia untuk terlibat dalam diskusi-diskusi penting terkait identitas dan modernisasi. Kedua organisasi ini berfungsi sebagai platform bagi para pelajar untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme.



Gambar 3.1 Peserta Kongres Het Indonesisch Verbond van Studeerenden (HIVS) di Wageningen

Sumber: Poeze, (2014), *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, KITLV.

3.4.1 Konflik Internal HIVS

HIVS organisasi yang awalnya di gagas untuk menarik kerja sama antara sesama mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Belanda, dalam

perkembangannya terjadi sebuah dinamika perselisihan yang kedepannya akan membuat Indische Vereeniging keluar dari Perserikatan Pelajar ini, dalam beberapa kongres yang di selenggarakan oleh HIVS sering kali muncul perselisihan dan perbedaan pendapat yang cukup tajam, terutama antara mahasiswa Belanda dan mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Indische Vereening. Benih perselisihan ini bermula pada kongres pertama yang dilaksanakan pada 29-31 Agustus 1918 di Wageningen.⁹¹ Pada pembukaan kongres, lagu kebangsaan Belanda, "Wilhelmus van Nassauen," dinyanyikan sebagai bagian dari protokol acara.⁹² Hal ini menjadi titik awal ketegangan karena Indische Vereening menganggap bahwa penyanyian lagu tersebut mencerminkan sikap pro-kolonial yang dapat membenarkan tindakan penjajahan dan menunjukkan ketidaksetiaan terhadap aspirasi bangsa Hindia untuk merdeka. Lagu tersebut dianggap sebagai simbol dari dominasi Belanda, yang seharusnya dihindari oleh sebuah organisasi yang mengklaim mewakili kepentingan mahasiswa Indonesia. Kemudian pemilihan tema kongres yang diusulkan oleh HIVS dinilai menunjukkan sikap yang membedakan antara Barat dan Timur. Pendekatan yang dianggap tidak seimbang ini semakin memperuncing ketegangan yang sudah ada.

Perselisihan berikutnya muncul ketika HIVS mengusulkan mosi yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, di mana mereka meminta agar sistem pendidikan di Belanda disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa Indonesia dan Tiongkok yang ingin melanjutkan studi. Usulan ini ditanggapi dengan penolakan yang kuat, terutama oleh anggota Indische Vereening, termasuk

⁹¹ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 31.

⁹² *Ibid.*

tokoh-tokoh seperti Dahlan Abdoellah, Soewardi, dan Goenawan. Mereka menekankan bahwa pendidikan tinggi seharusnya dilaksanakan di Hindia, sebagai upaya untuk membangun kapasitas intelektual di tanah air dan mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal.⁹³

Penolakan terhadap mosi ini menandakan pergeseran pandangan yang mendalam di antara anggota organisasi mengenai strategi yang paling efektif untuk mencapai kemajuan dan pembebasan. Sementara HIVS cenderung melihat pendidikan di Belanda sebagai langkah penting untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman, Indische Vereening berargumen bahwa otonomi pendidikan di Hindia adalah kunci untuk membangun kemandirian dan identitas nasional yang kuat.

3.4.2 Indische Vereeniging keluar dari Perserikatan

Pada tahun 1923 Perserikatan yang sebelumnya memiliki pengaruh signifikan dalam pergerakan politik di Hindia Belanda mengalami penurunan yang drastis. Cita-cita yang diusung oleh kaum Ethici, yang berupaya memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat Indonesia, semakin tertinggal seiring dengan dinamika perkembangan terbaru di dunia politik. Usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk membangun kesadaran politik mulai menunjukkan arah yang jelas menuju kemerdekaan. Dalam konteks ini, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial mulai dipandang kurang relevan dan tidak lagi memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

Pengaruh lingkungan Eropa yang semakin mengedepankan nilai-nilai demokrasi turut mempercepat proses radikalisasi di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa Indonesia menyaksikan bahwa gagasan-gagasan ideal yang

⁹³ H.J.Vermeer, "*Hari Kedua*", Denhag: Kolonial Weekblad, 2 Februari 1919.

dicanangkan oleh Perserikatan Belanda, yang semula tampak menginspirasi, semakin kehilangan makna dan relevansinya ketika dihadapkan pada realitas sosial masyarakat Hindia. Pada tahun 1923, kondisi Perserikatan terlihat melemah kongres-kongres yang diadakan tidak lagi mampu menjembatani perbedaan-perbedaan mendasar yang ada di antara anggotanya.⁹⁴ Sikap bersahabat yang sering kali dipromosikan hanya dianggap sebagai basa-basi semata, tanpa adanya tindakan konkret yang dapat mewujudkan tujuan bersama.

Akhirnya Indische Vereeniging memutuskan untuk keluar dari HIVS pada tahun 1923.⁹⁵ Keputusan ini mencerminkan kekecewaan dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap arah dan tujuan organisasi. Indische Vereeniging, sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang terkemuka, merasa bahwa keberadaannya dalam Perserikatan tidak lagi sejalan dengan aspirasi perjuangan untuk kemerdekaan yang semakin menguat di kalangan mahasiswa Indonesia.⁹⁶

Dengan demikian, pergeseran ini menandai fase penting dalam sejarah pergerakan nasional, di mana Indische Vereeniging mulai mengevaluasi kembali strategi dan aliansi mereka dalam menghadapi tantangan kolonial dan memperjuangkan hak-hak serta kebebasan bangsa. HIVS dan Indische Vereening menjadi cermin dinamika pemikiran politik dan sosial di kalangan generasi muda Indonesia. Mereka berjuang untuk menemukan jalan menuju kemerdekaan di tengah tantangan kolonialisme yang kompleks. Kolaborasi antara Indische Vereeniging dengan HIVS meskipun berakhir kurang memuaskan, namun pada mejadi cikal bakal terbentuknya gerakan nasionalis di Indische Vereeniging.

⁹⁴ J.E.Stokvis, *Antitesis di Deventer*, Denhag: Kolonial Weekblad, 18 September 1919.

⁹⁵ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 51.

⁹⁶ *Ibid.*

3.5 Perkembangan Majalah Hindia Poetra

Hindia Poetra adalah sebuah organ yang diterbitkan oleh Indische Vereening pada tahun 1916, Hindia Poetra menjadi saksi dari berkembangnya Indische Vereening dari organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik. Majalah ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 1 Maret 1916 di bawah kepemimpinan Loekman Djajadiningrat.⁹⁷ Hindia Poetra pada awal diterbitkan mempunyai tujuan sebagai media yang mempromosikan kebudayaan, sastra, dan aspek sosial yang ada di Hindia. Majalah Hindia Poetra berusaha memberikan gambaran yang lebih luas tentang kehidupan masyarakat Indonesia di tengah penjajahan. Meskipun demikian, pada saat awal penerbitannya, Hindia Poetra menerima kritik dari Frans Berding seorang intelektual yang aktif dalam gerakan politik, yang mempertanyakan mengapa majalah tersebut tidak mengambil pendekatan yang lebih agresif seperti majalah *De Indier*⁹⁸ yang berfungsi sebagai media propaganda politik dalam perjuangan kemerdekaan.⁹⁹ Kritik ini menunjukkan adanya harapan yang besar terhadap media untuk berperan dalam membangkitkan kesadaran politik di kalangan rakyat.

Soewardi ditunjuk sebagai pimpinan redaksi, merespons kritik tersebut dengan menjelaskan bahwa perjuangan di Belanda dianggap tidak efisien dan mungkin tidak langsung berdampak pada situasi di tanah air. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang diterima di Belanda harus dimanfaatkan sebagai persiapan untuk memperkuat perjuangan di Indonesia. Soewardi berpendapat

⁹⁷ Sudiyo, *Perhimpunan Indonesia*, Jakarta: Bina Adiaksara 2004, hlm 24.

⁹⁸

⁹⁹ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 52.

bahwa fokus yang berlebihan pada isu-isu politik saat itu dapat menyebabkan perpecahan di dalam Indische Vereening, yang justru akan melemahkan solidaritas di antara anggotanya.¹⁰⁰

Dengan pendekatan ini, Hindia Poetra berusaha mengedukasi anggotanya dan masyarakat luas tentang kebudayaan dan identitas nasional, sembari tetap menjaga fokus pada persatuan dalam perjuangan. Dalam konteks ini, majalah tersebut berfungsi tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran kolektif dan semangat nasionalisme di kalangan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri.

Hindia Poetra menjadi saksi perkembangan pemikiran dan strategi gerakan nasionalis di Indonesia pada masa itu, sekaligus mencerminkan dinamika antara pendidikan, kebudayaan, dan politik dalam upaya mencapai kemerdekaan. Hindia Poetra mengalami berbagai perubahan. Seri pertama mulai terbit pada bulan Maret 1916 dan terhenti pada terbitan kesembilan, yaitu pada bulan April 1917. Seri kedua dimulai dengan edisi khusus yang menyambut konferensi pada tanggal 29 Agustus 1918, dan kemudian berlanjut secara teratur hingga volume keempat, bagian kelima, pada bulan Agustus 1922. Kedua seri tersebut menggunakan judul Hindia Poetra, tetapi pada seri kedua ditambahkan judul Organ dari Het Indonesisch Verbond van Studeerenden (HIVS).¹⁰¹ Ikatan pelajar ini mencakup lebih dari sepuluh organisasi mahasiswa, termasuk Indische Vereeniging, yang

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 53.

¹⁰¹ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 102.

tertarik dengan istilah Indonesia yang mulai muncul pada masa itu dengan konotasi politik.¹⁰²

Setelah terjadinya serangkaian konflik di dalam internal HIVS yang melibatkan mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Belanda. Indische Vereeniging yang merupakan perwakilan mahasiswa Indonesia memutuskan keluar dari HIVS, yang kemudian mengambil alih kembali Hindia Poetra sebagai organ dari Indische Vereeniging yang sebelumnya sempat difusi sebagai organ dari HIVS. Keluarnya Indische Vereeniging memiliki pengaruh terhadap perkembangan Hindia Poetra.

Hindia Poetra yang sebelumnya berfungsi sebagai media sosial mengalami transformasi menjadi media propaganda, sejalan dengan model yang digunakan oleh majalah De Indier dari Indische Partij. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan respons terhadap tumbuhnya semangat nasionalisme di kalangan anggota Indische Vereeniging. Semangat ini didorong oleh kesadaran akan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda.

Hindia Poetra juga memiliki peran dalam memperkuat identitas nasional didalam Indische Vereeniging. Dalam Hindia Poetra di terbitkan sebuah artikel yang memberitahukan adanya perubahan nama dari Indische Vereeniging istilah "Indische" di rubah menjadi "Indonesia" majalah ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang identitas bangsa yang sedang terbentuk. Istilah baru ini, yang berakar dari khazanah antropologi, mencerminkan semangat kolektivitas di antara berbagai etnis dan budaya di Nusantara.¹⁰³ Langkah ini tidak hanya simbolis, tetapi

¹⁰² John Ingleson, *Mahasiswa Nasionalism & Penjara, Perhimpunan Indonesia 1923-1928*, Depok: Komunitas Bambu, 2018, hlm 31.

¹⁰³ Amanan, Amanan, and Sabrina Sabrina, "Meneliki Asal Usul Bahasa Indonesia" *Ensiklopedia of Journal* 5.3, 2023, hlm 72-76.

juga mencerminkan aspirasi untuk menciptakan kesatuan di tengah keragaman. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan budaya yang berbeda.

Hindia Poetra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924,¹⁰⁴ yang menandai perubahan peran majalah ini menjadi lebih progresif sebagai wadah bagi pemikir muda untuk menyebarkan ide-ide modern tentang kemajuan sosial, politik, dan pendidikan. Majalah ini berkontribusi besar dalam membangkitkan kesadaran nasional dan kritis terhadap kebijakan kolonial, serta memperkuat gerakan kemerdekaan Indonesia. Selain berfungsi sebagai suara mahasiswa, Indonesia Merdeka memainkan peran penting dalam membangun identitas nasional dan memperjuangkan kemerdekaan. Dengan keberaniannya mengangkat isu sensitif, majalah ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

3.6 Arah Baru Indishe Vereeniging

3.6.1 Indishe Vereeniging Menadi Indonesishe Vereeniging

Arah baru Indishe Vereeniging berawal di tahun 1922 yang ada saat itu mengadakan rapat penting pada 19 Februari 1922 di Den Haag, Belanda.¹⁰⁵ Rapat ini memiliki agenda krusial, yaitu pemilihan ketua baru. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Soetomo, yang merupakan ketua lama, beserta seluruh anggota kepengurusannya, secara resmi meletakkan jabatan mereka. Proses pemilihan kemudian menghasilkan Hermen Kartawisastra sebagai ketua Indishe Vereeniging untuk tahun 1922.

¹⁰⁴ Hatta, *Memoir Biografi Mohammad Hatta*, Jakarta: Tintamas 1979, hlm 102.

¹⁰⁵ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 67.

Sejak tahun tersebut, proses konsolidasi dalam tubuh Indishe Vereeniging telah mencapai kestabilan yang signifikan. Ruang gerak organisasi yang awalnya terbatas pada kegiatan sosial-budaya dan penguatan kekerabatan kini telah bertransformasi menjadi arena kegiatan politik yang lebih aktif dan berani. Dalam konteks ini, Indishe Vereeniging mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan.

Salah satu isu yang mulai diperbincangkan dikalangan aktivis adalah nama "India" yang digunakan oleh organisasi tersebut. Mereka merasa bahwa istilah ini tidak lagi mencerminkan identitas keanggotaan yang jelas dan tegas. Dengan semangat nasionalisme yang semakin berkembang, para mahasiswa memutuskan untuk mengganti nama organisasi dengan istilah "Indonesia".¹⁰⁶

Istilah "Indonesia" pertama kali diperkenalkan dalam khasanah antropologi oleh James Logan, seorang pegawai Inggris, pada tahun 1850.¹⁰⁷ Ia menggunakan istilah tersebut untuk merujuk kepada kepulauan yang kini dikenal sebagai Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1884, Adolf Bastian, seorang antropolog Jerman, mempopulerkan nama tersebut dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan kepulauan di Asia Tenggara.¹⁰⁸ Pemilihan nama Indonesia menjadi simbol penting dalam proses pencarian identitas nasional yang lebih kuat di kalangan rakyat dan mahasiswa Indonesia, menandai pergeseran dari identitas kolonial menuju identitas yang lebih otonom dan reflektif terhadap sejarah dan

¹⁰⁶ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 68.

¹⁰⁷ Hatta, *Memoir Biografi Mohammad Hatta*. Jakarta: Tintamas 1979, hlm 126.

¹⁰⁸ *Ibid.*

budaya lokal. Akhirnya pada tahun 1922 nama Indische Vereeniging di ubah menjadi Indonesische Vereeniging. Nama baru ini sekaligus meluputi nama politim yang di berikan kepada tanah air.¹⁰⁹

3.6.2 Makna Perubahan nama

Perubahan nama ini bukan hanya sekadar langkah simbolis ia mencerminkan evolusi pemikiran dan strategi yang diambil oleh Indische Vereeniging dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme. Dengan mengganti nama tersebut, organisasi ini berupaya memperkuat kesadaran kolektif dan identitas nasional di kalangan anggota serta masyarakat luas.¹¹⁰ Langkah ini menjadi bagian integral dari dinamika pergerakan nasional yang lebih luas, di mana banyak organisasi dan individu lainnya mulai mengadopsi simbol-simbol dan bahasa yang menekankan identitas Indonesia. Indische Vereeniging, di bawah kepemimpinan Hermen Kartawisastra, terus berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia, mendorong partisipasi aktif dalam berbagai forum politik, dan mengadvokasi hak-hak rakyat.

Periode kepemimpinan Hermen Kartawisastra sebagai ketua baru menjadi momen penting yang menandai transisi Indische Vereeniging dari organisasi sosial-budaya menjadi kekuatan politik yang siap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Transformasi ini tidak hanya berpengaruh pada dinamika organisasi, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas terhadap kesadaran nasional di seluruh nusantara.

¹⁰⁹ Sudiyo, *Perhimpunan Indonesia*, Jakarta: Bina Adiaksara 2004, hlm 31.

¹¹⁰ John Ingleson, *Mahasiswa Nasionalism & Penjara, Perhimpunan Indonesia 1923-1928*, Depok: Komunitas Bambu, 2018, hlm 31.

3.6.3 Munculnya Keterangan Dasar Kemerdekaan

Indonesische Vereeniging pada bulan Januari 1923 mengadakan rapat umum anggota dengan tujuan untuk merombak kepengurusan organisasi. Dalam rapat tersebut, Hermen Kartawisastra, yang menjabat sebagai ketua, secara resmi mengundurkan diri bersama seluruh pengurus lama. Pemilihan ketua baru menghasilkan Iwa Koesoema Soemantri sebagai pemimpin untuk periode 1923. Pengurus baru yang dipimpin oleh Iwa Koesoema Soemantri terdiri dari lima anggota, yaitu: Iwa Koesoema Soemantri (Ketua), J.B. Sitanala (Sekretaris), Mohammad Hatta (Bendahara), Mr. R. Sastromoeljono (Komisaris), dan Darmawan Mangoenkoesoemo (Arsiparis).¹¹¹

Pada kepemimpinan Iwa Koesoema Soemantri, muncul sebuah keterangan dasar yang akan di jadikan dasar bekerja pada pengurus baru Indonesishe Veereniging, pernyataan ini dituliskan dalam majalah Hidia Poetra, yang pada waktu itu kembali terbit untuk kedua kalinya. Isi dari pernyataan asas yang diusung pada periode kepemimpinan Iwa Koesoema Soemantri menekankan perlunya kesadaran kolektif di kalangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meraih kemerdekaan dari penjajahan.¹¹² Dalam menjelaskan dasar-dasar pemikirannya, Iwa Koesoma Soemantri menyatakan bahwa pengalaman sejarah masa lalu menunjukkan bahwa perkumpulan-perkumpulan di Indonesia tidak melihat alternatif lain selain jalur non-kooperasi dengan pemerintah kolonial.

¹¹¹ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 75.

¹¹² John Ingleson, *Mahasiswa Nasionalisme & Penjara, Perhimpunan Indonesia 1923-1928*, Depok: Komunitas Bambu, 2018, hlm 32.

Pandangan ini semakin diperkuat oleh pernyataan Presiden Woodrow Wilson,¹¹³ yang menyatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, sebuah prinsip yang diterapkan dalam politik dunia saat itu. Iwa Koesoma Soemantri berpendapat bahwa prinsip non-kooperasi adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Menurutnya, jalan non-kooperasi ini bukan hanya merupakan penolakan terhadap kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tenaga nasional Indonesia, dengan fokus pada pengembangan kapasitas dan kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan politik dan sosial.

“Masa datang bangsa Indonesia semata mata dan hanya terletak pada adanya suatu bentuk pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam artii yang sebenarnya karena hanya bentuk pemerintah yang semacam itulah dapat diterima oleh rakyat. Bentuk pemeritnah semacam itu harus di tuju oleh tiap tiap orang Indonesia menurut kecakapannnya dengan kekuatan dan kemmapuan diri sendiri, bebas dari bantuan asing. Tiap tiap perpecahan tenaga tenaga Indonesia, dalam bentuk apapun di tentnag sekereas kerasnnya, karena hanya persatuan tenaga putra Indonesia dapat mencapai tujuan bersama itu”.¹¹⁴

Di bawah kepemimpinan Iwa Koesoema Soemantri, Indonesische Vereeniging bertransformasi menjadi organisasi yang lebih terfokus pada advokasi politik dan pergerakan nasional. Dengan memperkenalkan pernyataan asas dan menggunakan Hidia Poetra sebagai alat untuk menyebarkan gagasan-gagasan progresif, organisasi ini berupaya untuk mendorong partisipasi aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme. Langkah ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam struktur internal organisasi, tetapi juga menunjukkan komitmen yang semakin kuat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia.

¹¹³ Woodrow Wilson, *8 Januari 1918 "Empat Belas Poin" Wilson*, Virginia: Miller Center, Di akses pada 11 November 2024 dari <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-8-1918-wilsons-fourteen-points>

¹¹⁴ Poeze, *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KITLV dan Universitas Leiden, 2014, hlm 83.

Hidia Poetra juga mempunyai peran baru dan tidak hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik yang strategis. Melalui artikel-artikel dan tulisan yang disajikan, majalah ini berupaya membangun kesadaran nasional, memperkuat semangat perjuangan, dan memberikan wawasan kepada anggota organisasi serta masyarakat luas tentang isu-isu yang dihadapi bangsa.

Pengurus Indonesische Vereeniging di bawah pimpinan Iwa Koesoema Soemantri meletakkan jabatannya pada tanggal 9 Februari 1924 dalam rapat anggota dan di gantikan oleh pengurus baru di bawah Nazir Pamotjak. Susunan pengurus baru itu adalah Nazir Pamontjak (Ketua), A.A. Maramis (Sekertaris), R. Soewarno (Bendahara) M. Soekiman (Komisaris dan Mohammad Nazir (Archivaris).¹¹⁵ Pada periode ini redaksi majalah Hindia Poetra di ajukan untuk melakukan perubahan nama majalah menjadi majalah Indonesia merdeka, dan usul tersebut di terima baik oleh Rapat Umum Anggota. Dengan demikian nama majalah kini menunjuk jelas pada tujuan organisasi yaitu Indonesia Merdeka.¹¹⁶

Pada periode ini, terbitlah sebuah buku peringatan berjudul Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908-1923.¹¹⁷ Buku ini merupakan karya monumental yang mencatat perjalanan penting organisasi Indische Vereeniging dari tahun 1908 hingga 1923. Namun, isi Gedenkboek tidak hanya terbatas pada narasi sejarah perjalanan organisasi, melainkan juga mengungkapkan ide-ide para anggotanya yang berkembang selama periode tersebut.

¹¹⁵ John Ingleson , *Mahasiswa Nasionalism & Penjara, Perhimpunan Indonesia 1923-1928*, Depok: Komunitas Bambu, 2018, hlm 32.

¹¹⁶ Hatta, *Memoir Biografi Mohammad Hatta*. Jakarta: Tintamas 1979, hlm 156.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 158.

Buku ini menjadi dokumen penting yang mencerminkan semangat nasionalisme yang tumbuh di kalangan intelektual muda Indonesia yang belajar di Belanda, serta upaya mereka untuk melawan dominasi Belanda dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal pendidikan, sosial, dan politik. Dalam konteks ini, *Gedenkboek* tidak hanya mencatat perjalanan organisasi, tetapi juga menggambarkan bagaimana *Indische Vereeniging* mulai mengembangkan pandangan yang berseberangan dengan kebijakan kolonial Belanda dan berupaya menciptakan identitas nasional yang independen.

Terbitnya buku ini tidak lepas dari kontroversi. *Indische Vereeniging* dan buku *Gedenkboek* menerima kritik keras dari pers Belanda. Beberapa kalangan di Belanda menilai organisasi ini telah terpengaruh oleh semangat revolusioner yang berpotensi merongrong stabilitas kekuasaan kolonial.¹¹⁸ Bahkan, ada yang berpendapat bahwa *Indische Vereeniging* telah terinfeksi oleh semangat revolusioner yang sulit untuk dihilangkan kembali, sehingga bisa mengarah pada tindakan yang lebih radikal. Kritik ini mencerminkan ketakutan Belanda akan berkembangnya gerakan nasionalisme yang semakin mendalam di kalangan kaum terpelajar Indonesia, yang suatu saat akan menantang otoritas kolonial.

3.6.4 *Indonesische Vereening* menjadi Perhimpunan Indonesia

Indonesische Vereeniging pada tahun 1925 kembali mengadakan rapat. Rapat tersebut menghasilkan susunan kepengurusan baru yang terdiri dari: Soekiman Wirdjosandjojo sebagai Ketua, A.Z. Mononutu sebagai Wakil Ketua,

¹¹⁸ John Ingleson, *Mahasiswa Nasionalism & Penjara, Perhimpunan Indonesia 1923-1928*, Depok: Komunitas Bambu, 2018, hlm 30.

Mohammad Nazif sebagai Bendahara I, Amir Boediarto sebagai Bendahara II, dan Mohammad Joesoef sebagai Komisaris¹¹⁹.

Soekiman mengganti nama *Indonesische Vereeniging* menjadi *Perhimpunan Indonesia*, sebagai kelanjutan dari penerbitan *Indonesia Merdeka*¹²⁰. Perubahan nama ini, serta penggunaan bahasa Melayu, dianggap sebagai cerminan dari berkembangnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia¹²¹. Perubahan nama ini mencerminkan komitmen organisasi untuk memperkuat identitas nasional dan menegaskan aspirasi perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan nama baru ini, *Perhimpunan Indonesia* sudah memiliki tujuan yang lebih jelas menggambarkan visi dan misi mereka dalam membangun solidaritas di kalangan rakyat Indonesia serta memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka dalam konteks politik yang semakin kompleks.



Gambar 3.3 Pengurus Indishe Vereniging periode 1925
Sumber : Hatta,(1979). *Memoir Biografi Mohammad Hatta*, Tintamas.

¹¹⁹ Hatta, *Memoir Biografi Mohammad Hatta*. Jakarta: Tintamas 1979, hlm 170.

¹²⁰ Hatta, *Untuk Negeriku Bukittinggi-Rotterdam lewat Betawi*, Jakarta: Buku Kompas, 2011, hlm 226.

¹²¹ Ahmad Soebardjo, *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1978, hlm 117.

3.6.5 Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia

Pada masa kepemimpinan Soekimana keterangan dasar dalam Organisasi Perhimpunan Indonesia juga mengalami perubahan menuju arah yang lebih progresif dan revolusioner, yang kemudian dideklarasikan melalui media surat kabar Indonesia Merdeka. Dalam deklarasi tersebut, PI menetapkan beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Indonesia bersatu dan mengesampingkan perbedaan golongan maka dapat dipastikan akan mematahkan dominasi kekuasaan dengan massa aksi nasional yang sadar dan mandiri.
2. Partisipasi seluruh rakyat Indonesia menjadi syarat yang mutlak agar terwujudnya tujuan tersebut.
3. Unsur dominan dan esensial dalam setiap masalah politik kolonial adalah konflik kepentingan antara penguasa dengan yang dikuasai, konflik tersebut harus dijawab oleh pihak yang didominasi dengan penajaman proses berpikir.
4. Pengaruh dominasi yang merusak dan melemahkan moral terhadap kondisi fisik serta psikis masyarakat Indonesia, untuk itu diperlukan upaya dan program kerja yang kuat dalam mengatasi kondisi tersebut.¹²²

Keterangan dasar yang dideklarasikan oleh Perhimpunan Indonesia bukan sekadar prinsip-prinsip organisasi, melainkan sebuah manifesto politik yang mengandung nilai-nilai fundamental seperti persatuan (unity), kebebasan (liberty), dan kesetaraan (equality).¹²³ Manifesto ini mencerminkan komitmen PI terhadap perjuangan kemerdekaan dan perlawanan terhadap kolonialisme, serta menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Pernyataan dasar ini berhasil menarik dukungan moral dari berbagai kalangan, termasuk gerakan buruh internasional, partai politik progresif, pekerja, dan serikat buruh. Dukungan tersebut tidak hanya datang dari dalam Indonesia,

¹²² Hatta, *Memoir Biografi Mohammad Hatta*. Jakarta: Tintamas 1979, hlm 171.

¹²³ Kartodirdjo, S., *Manifesto Politik Pemuda Banyak Dilupakan*, Baliurang: No. 25. Tahun 1997.

tetapi juga meluas ke kalangan mahasiswa dan intelektual dari Asia dan Afrika yang belajar di kota-kota besar Eropa, seperti Paris, Berlin, London, dan Wina.¹²⁴ Dengan demikian, Perhimpunan Indonesia memperoleh perhatian internasional, memperkuat posisi mereka sebagai bagian dari gerakan global yang menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah.

Untuk menunjang tercapainya tujuan dari manifesto politik Perhimpunan Indonesia, Soekiman juga membentuk program program yang harus di lakukan untuk mencapai tujuannya tersebut, program tersebut di tuangkan dalam 3 pasal

- Pasal 1 : Mempropagandakan asas asas perhimpunan lebih insentif, terutama di Indonesia
- Pasal 2 : Menarik perhatian Internasional pada masalah Indonesia.
- Pasal 3 : Perhatian para anggota harus di bangkitkan untuk soal soal internasional denan mengadakan ceramah ceramah, bepergian ke negara lain untuk studia tau yang lainnya.¹²⁵

Program tersebut di buat oleh Perhimpunan Indonesia setelah adanya kesadaran bahwa nasionalisme Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, pasal satu telah di tempuh oleh Ali Sastroamidjojo dengan menyeludupkan Majalah Indonesia Merdeka ke Indonesia, sedangkan program kerja ke dunia Internasional yang tercantum pada pasal 2 dan 3 baru dapat di laksanakan pada periode Mohammad Hatta sebagai ketua.¹²⁶

¹²⁴ Ahmad Soebardjo, *Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1978, hlm 117.

¹²⁵ Ali Sastroamidjojo, *Tonggak Tonggak di Perjalananku*, Jakarta: Kinta, 1974, hlm 48.

¹²⁶ Lukman Hakim, *Soekiman*. Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2022, hlm 35.